



INDEKS BERITA

2
Isu Petani Relevan
untuk Konferensi
Asia Afrika

11
Petani SPI Kalimantan
Selatan Datangi
Kementerian Agraria &
Tata Ruang

14
Divestasi, Langkah
Lanjut Lindungi
Hortikultura



*"Petani Bisa Sejahtera
Melalui Koperasi"*

*Sasmitra
Ketua DPC SPI Kabupaten Kepahiang*

Asia Afrika untuk Kedaulatan Pangan



(Foto) Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih memberi kata sambutan dalam Konferensi Rakyat Asia Afrika (KRAA) di Jakarta, 18 April 2015, yang dilaksanakan koalisi masyarakat sipil untuk menyambut peringatan Konferensi Asia Afrika ke-60.

JAKARTA. Peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) berlangsung di Jakarta-Bandung minggu ini (19-24 April). Momen bersejarah ini akan membahas solidaritas negara-negara Asia Afrika, yang historisnya melawan penjajahan. Momen ini pun dirayakan oleh kaum tani di Indonesia. Serikat Petani Indonesia (SPI) bersama puluhan organisasi rakyat dan LSM yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Sipil untuk Kerjasama Selatan-Selatan menggelar Konferensi Rakyat Asia Afrika (KRAA). Perhelatan ini diadakan di Galeri Nasional, Jakarta Pusat pada Sabtu (18/4). Untuk lebih lengkapnya, silahkan nikmati di edisi kali.

Isu Petani Relevan untuk Konferensi Asia Afrika



(Foto) Suasana Konferensi Rakyat Asia Afrika di Galeri Nasional, Jakarta, Sabtu, 18 April 2015

JAKARTA. Peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) akan berlangsung di Jakarta-Bandung minggu ini (19-24 April). Momen bersejarah ini akan membahas solidaritas negara-negara Asia Afrika, yang historisnya melawan penjajahan.

Momen ini pun dirayakan oleh kaum tani di Indonesia. Serikat Petani Indonesia (SPI) bersama puluhan organisasi rakyat dan LSM yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Sipil untuk Kerjasama Selatan-Selatan menggelar Konferensi Rakyat Asia Afrika (KRAA). Perhelatan ini diadakan di Galeri Nasional, Jakarta Pusat pada Sabtu (18/4).

“(Konferensi) Ini untuk membahas reaktualisasi KAA untuk situasi terkini,” ujar Henry Saragih, Ketua Umum SPI, saat memberi sambutannya tadi pagi.



(Foto) Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih memberi kata sambutan dalam Konferensi Rakyat Asia Afrika (KRAA) di Jakarta, 18 April 2015, yang dilaksanakan koalisi masyarakat sipil untuk menyambut peringatan Konferensi Asia Afrika ke-60.

"Kita juga ingin merumuskan visi rakyat untuk peringatan ke-60 KAA," ujar dia lagi. SPI memang tercatat aktif terkait tema KAA ini, terutama sejak tahun 2005 lalu," tuturnya lagi.

"Ya, kita berusaha agar isu-isu rakyat Asia Afrika yang kekinian bisa dibicarakan di forum antarnegara tersebut. KAA selain progresif, juga mewakili populasi rakyat yang progresif sekaligus kompleks. Perjuangan petani, buruh dan hak asasi di kawasan ini sangat masif," tukas Henry di pidato pembukaan.

Muhammad Reza, ketua panitia KRAA menyampaikan, peringatan KAA ke-60 jangan sepenuhnya mengglorifikasi masa lalu.

Sementara itu, Makmur Keliat, akademisi dari Universitas Indonesia menyatakan agar KAA mulai melihat agenda-agenda yang praktis dan fungsional.

"Agar bisa terasa, dan dilakukan. Untuk rakyat, tentu hal-hal yang berguna. Solidaritas, misalnya," kata dia.

Lebih jauh lagi, ia melihat ada potensi kerja sama kerakyatan yang bisa ditindaklanjuti di KAA.

"Petani, buruh, harus melihat celah tersebut. Ada tempat (space) yang harus disediakan negara untuk isu-isu petani dan buruh. Rakyat harus berusaha menjembatani isu tersebut: mulai dari nasional dulu. Lalu hubungkan dengan yang benar-benar dibutuhkan rakyat Asia Afrika," pungkask dia.

Sementara itu di Dewan HAM PBB, inisiatif deklarasi hak asasi petani telah memasuki tahap negosiasi selanjutnya.

"Inilah contoh konkret solidaritas rakyat dan negara Asia Afrika. Bersama Amerika Latin kita menggolkan agenda hak asasi petani agar jadi undang-undang di tingkat global," ujar Henry lagi.

"Kita juga mafhum bahwa masih banyak masalah petani dan masyarakat pedesaan di kawasan ini. Nah, inilah yang harus dibahas lebih lanjut. Jumlah petani kecil di Asia Afrika ini juga signifikan. Juga termasuk rentan sekali akan kelaparan," tutup Henry.

Visi rakyat inilah yang akan dikemas dalam dokumen hasil Konferensi Rakyat Asia Afrika. Isu-isu petani seperti hak atas tanah, perjuangan melawan kelaparan, hak atas pangan, serta solidaritas petani dan gerakan rakyat lain di Asia Afrika akan menjadi masukan substansial. Dokumen hasil Konferensi Rakyat Asia Afrika ini rencananya akan diberikan langsung ke Luhut Panjaitan, Kepala Staf Kepresidenan sekaligus panitia Peringatan 60 Tahun KAA.

Solidaritas KAA tak harus melulu dalam perspektif negara dengan negara, namun dapat langsung rakyat dengan rakyat—atau rakyat, pemerintah dan negara. Partisipasi langsung rakyat pun dimungkinkan dalam dinamika global saat ini.

Dari sini, petani mengharapkan agar rakyat, pemerintah serta semangat KAA semakin dekat. Di sinilah petani menjadi sangat relevan untuk berkontribusi langsung.#

**Laksanakan Pembaruan Agraria
untuk Kedaulatan Pangan**

**Dialog Masyarakat Sipil dengan Pemerintah
dalam rangka Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika**

Dasa Sila Bandung Masih Relevan



(Foto) Dialog gerakan masyarakat sipil dengan pemerintah di sekretariat Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) di Jakarta dalam rangka peringatan Konferensi Asia Afrika ke-60 (01/04).

JAKARTA. Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Selatan-Selatan (terdiri atas SPI, INFID, Migrant Care, KRuHA, KONTRAS, API, Wahid Institute, ASPUKK, IHCS, KPI, KAU, WALHI dan IGJ) menjadi tuan rumah dialog antara gerakan masyarakat sipil dengan pemerintah di Jakarta (01/04).

Dalam dialog yang dilaksanakan untuk menyambut peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA) ke 60 ini, Ketua Umum SPI Henry Saragih menyampaikan, bagi gerakan masyarakat sipil peringatan KAA ke-60 ini istimewa. Oleh karena itu menurutnya, penting bagi pemerintah untuk mengetahui agenda dan posisi gerakan masyarakat sipil.

"Persoalan-persoalan yang dihadapi negara-negara Asia-Afrika dari tahun 50-an sampai sekarang masih banyak yang relevan, selain masalah-masalah kolonialisasi masa lalu, Dasa Sila Bandung masih sangat relevan untuk dibahas. Krisis iklim juga mengorbankan banyak negara Asia-Afrika. Perusakan hutan, perampasan tanah dan air masih meluas hari ini, juga masalah-masalah HAM," tutur Henry Saragih.

Henry juga menyampaikan, situasi kelaparan yang jumlahnya masih 1 miliar orang di Asia-Afrika masih belum bisa dipecahkan oleh pemerintah2 dunia.

"Di sisi lain, gerakan masyarakat sipil sudah punya dokumen positif; seperti aktif mendorong pengakuan hak asasi petani dan hak asasi orang yang bekerja di Pperdesaan- yang akan segera dideklarasikan di PBB," ungkap Henry.

Hal senada diungkapkan Muhammad Reza, Ketua Panitia Konferensi Rakyat Asia Afrika (KRAA). Menurutnya, jaringan gerakan masyarakat sipil Indonesia akan menyelenggarakan Konferensi Rakyat Asia Afrika yang akan melibatkan juga jaringan internasional.

"Jadi ini harus disinergikan," kata Muhammad Reza.

Menanggapi hal ini, Direktur Afrika Kementerian Luar Negeri Lasro Simbolon, yang turut hadir dalam dialog ini mengemukakan, pemerintah serius menanggapi undangan gerakan masyarakat sipil dan merasa perlu mendengar masukan-masukannya.

"Pelibatan gerakan masyarakat sipil merupakan PR bersama pemerintah dan masyarakat. Di Asia, peran aktif masyarakat sipil cukup lumrah sejak lama, untuk sebagian Afrika masih merupakan sesuatu yg baru, perlu didorong bersama. Belakangan gerakan masyarakat sipil Afrika mulai bangkit dan perlu dibuat mekanismenya. Oleh karena itu pemerintah akan dengan senang hati menerima dokumen usulan masyarakat sipil," imbuhnya.#

WEF Asia Timur 2015: Menangkan Swasta, Pemerintah Jangan Lupakan Petani



JAKARTA. Selama tiga hari (19-21 April) Indonesia menjadi tuan rumah Forum Ekonomi Dunia untuk Asia Timur (*World Economic Forum for East Asia*) di Jakarta. Tidak kurang dari 700 pengusaha dari 41 negara asing akan menghadiri forum tersebut. Para CEO pimpinan perusahaan pertanian yang memastikan hadir antara lainnya Cargill, DuPont, Monsanto, Nestlé, Syngenta, dan lainnya.

Menurut Ketua Umum SPI Henry Saragih, pemerintahan Jokowi-JK seharusnya membatasi investasi swasta di bidang pertanian.

"Presiden bilang 'silahkan datang dan berinvestasi di Indonesia, dan kalau ada apa-apa silahkan telepon saya', apakah hal ini berlaku sama bagi jika petani mengalami konflik lahan, air dan benih? Apakah petani bisa langsung telpon presiden kalau tanah mereka dirampas perusahaan?" tegas Henry di Jakarta (21/04).

Henry melanjutkan, jika ingin bersama memajukan Asia, pemerintah harus mengedepankan kerjasama publik ke publik, bukan malah kerjasama dengan perusahaan swasta.

"Swasta tidak bisa mengambil alih peran negara, seperti redistribusi sumber daya agraria, keanekaragaman hayati dan pengetahuan tradisional, karena alamiahnya mereka mencari laba," lanjut Henry.

Indonesia memang menjanjikan pasar yang sangat menjanjikan bagi perusahaan transnasional seperti Cargill, Syngenta, hingga Monsanto.

"Inilah mengapa mereka sangat berhasrat berinvestasi di sini. Cargill contohnya, mereka sudah siap investasi US\$ 1 milyar khusus untuk Kakao," kata Henry.

Sementara itu, dana perbaikan untuk pupuk, irigasi dan benih untuk tahun 2015 "hanya" berkisar sebesar Rp 15 trilyun—atau US\$1,2 milyar.

"Bagaimana kita bisa berdaulat pangan jika investasi dari APBN hampir sama dengan investasi perusahaan untuk kakao?" tanya Henry.

Ini menggarisbawahi kekalahan negara dari swasta di pertanian.

"Fakta yang terjadi, perusahaan transnasional ini sama sekali tidak memberikan dampak apa-apa selain keuntungan bagi mereka disini. Krisis pangan berkepanjangan, petani yang diusir dari lahannya, hingga hilangnya benih lokal," kata Henry lagi.

Henry menambahkan, kedaulatan di bawah Nawa Cita harusnya mengutamakan masyarakat kecil, bukan malah pihak swasta.

"Kami petani SPI memperingatkan presiden agar setia pada Nawa Cita tersebut, dan tidak lupa untuk memenangkan petani di atas swasta," tambah Henry. #

Petani Menyambut Baik Pidato Presiden di Konferensi Asia Afrika, Realisasi Segera Lebih Baik



(Foto). Presiden RI ke-7 Joko Widodo dalam acara deklarasi BAMUSTANI, pertengahan tahun 2014.

JAKARTA. Pidato Presiden Joko Widodo pada peringatan ke-60 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) dipuji khalayak luas pada Rabu (22/4). Serikat Petani Indonesia (SPI) adalah salah satu pihak yang juga menyambut baik pidato tersebut.

Dari sekitar 838 kata yang ada di naskah, Jokowi mengungkapkan dengan gamblang masalah rakyat Asia Afrika kekinian, juga relevansi “Semangat Bandung” untuk masa depan dua region penting di dunia tersebut.

“Kita senang Jokowi mengemukakan masalah ketimpangan, ketidakadilan dan kekerasan pada forum tertinggi negara-negara Asia Afrika. Inilah beberapa poin yang juga menjadi masukan Konferensi Rakyat Asia Afrika (KRAA) yang berlangsung pada Sabtu (19/4) lalu. Meski hari sebelumnya pada Forum Ekonomi Dunia (WEF) untuk Asia Timur beliau mengundang swasta dan perusahaan transnasional untuk ramai-ramai investasi di bidang pertanian,” papar Henry Saragih di kantor SPI, Jakarta (22/04).

“Ketimpangan dan ketidakadilan, juga keinginan rakyat Asia Afrika untuk bahu membahu dengan pemerintah untuk memecahkannya, adalah masalah mendasar yang perlu segera ditindaklanjuti bersama. Masukan tersebut sendiri sudah diterima oleh panitia KAA pada pelaksanaan KRAA empat hari lalu di Galeri Nasional, Jakarta,” terang Henry lagi.

Lebih lanjut lagi, Henry menyampaikan kegembiraan petani untuk semangat melepaskan diri dari pengaruh Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Pembangunan Asia (ADB).

“Petani sudah lama menolak lembaga-lembaga finansial neoliberal tersebut. Merekalah akar ketimpangan tanah, air dan benih di negeri ini,” terang Ketua Umum SPI itu.

“Bank Dunia merancang dan mempraktikkan pasar tanah sejak era 1990-an, sementara Letter of Intent IMF 1997 membuka keran impor dan liberalisasi pangan. IMF jugalah yang menyarankan privatisasi BULOG. Sementara itu, ADB juga berkontribusi besar untuk liberalisasi tanah untuk swasta pada beberapa UU dan peraturan terkait,” ujar Henry.

“Indonesia sebenarnya contoh baik untuk tidak tergantung pada Bank Dunia, IMF dan ADB. Kita berusaha lepas dari IMF, walaupun belum sepenuhnya bebas,” ujar dia lagi.

Henry melanjutkan, Bank Dunia pernah mendorong liberalisasi air dalam proyeknya. Tapi rakyat bersatu, dan akhirnya UU tentang air yang liberal tidak berlaku lagi tahun ini.

“Nah, kita sekarang menunggu realisasi pidato Presiden Jokowi tersebut. Air misalnya, harus diolah sepenuhnya oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” kata Henry.

Keputusan judicial review UU Air memang belum sepenuhnya ditindaklanjuti pemerintah. Sementara, akses hak atas air masih menjadi masalah petani dan masyarakat kota. Swasta pun masih terus mengeruk untung dari air yang harusnya dinikmati rakyat secara bebas.

Henry menambahkan, Pak Jokowi harus segera merealisasikan pidato baik ini. Kesejahteraan, solidaritas, dan hak asasi manusia seperti yang disebutkan memang harus segera kita wujudkan bersama. Petani jelas mendukung dan siap bekerja keras bersama.

“Terakhir, para petani SPI memuji komitmen kita untuk Palestina. Kita sudah bersolidaritas dengan petani di sana, dan alangkah baiknya jika kemerdekaan dan hak asasi rakyat Palestina juga diakui seluruh dunia,” tutup Henry.#



LEMBARAN KHUSUS

campesinos

KABAR INTERNASIONAL

PEMBARUAN TANI
EDISI 135
MEI 2015

7

Hari Perjuangan Petani Internasional 2015, Tolak Perjanjian Perdagangan Bebas & Perusahaan Transnasional

ZIMBABWE. Hari ini, 17 April 2015, Hari Perjuangan Petani Internasional, ribuan perempuan dan laki-laki petani dari gerakan petani internasional La Via Campesina melakukan mobilisasi di seluruh dunia, menolak perusahaan transnasional (TNC) dan perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang berdampak buruk terhadap kesejahteraan petani kecil dan kedaulatan pangan sebuah negara. Hari Perjuangan Petani Internasional sendiri mulai diperingati oleh La Via Campesina sejak 17 April 1996, untuk memperingati belasan petani Brasil yang tewas ditembak oknum karena mempertahankan lahannya.

Ndiakhate Fall, salah seorang anggota Komite Koordinasi Internasional (ICC) La Via Campesina menyampaikan, perjanjian perdagangan bebas mempromosikan perusahaan pertanian transnasional dan mode industri produksi kapitalis ini sangat bergantung pada pertanian yang menggunakan bahan kimia.

"Hal tersebut telah meningkatkan perpindahan, pengusiran, dan hilangnya petani kecil. Perjanjian perdagangan bebas (FTA) hanya menempatkan keuntungan sebagai prioritas utama, di atas semua hak dan lainnya," tuturnya.

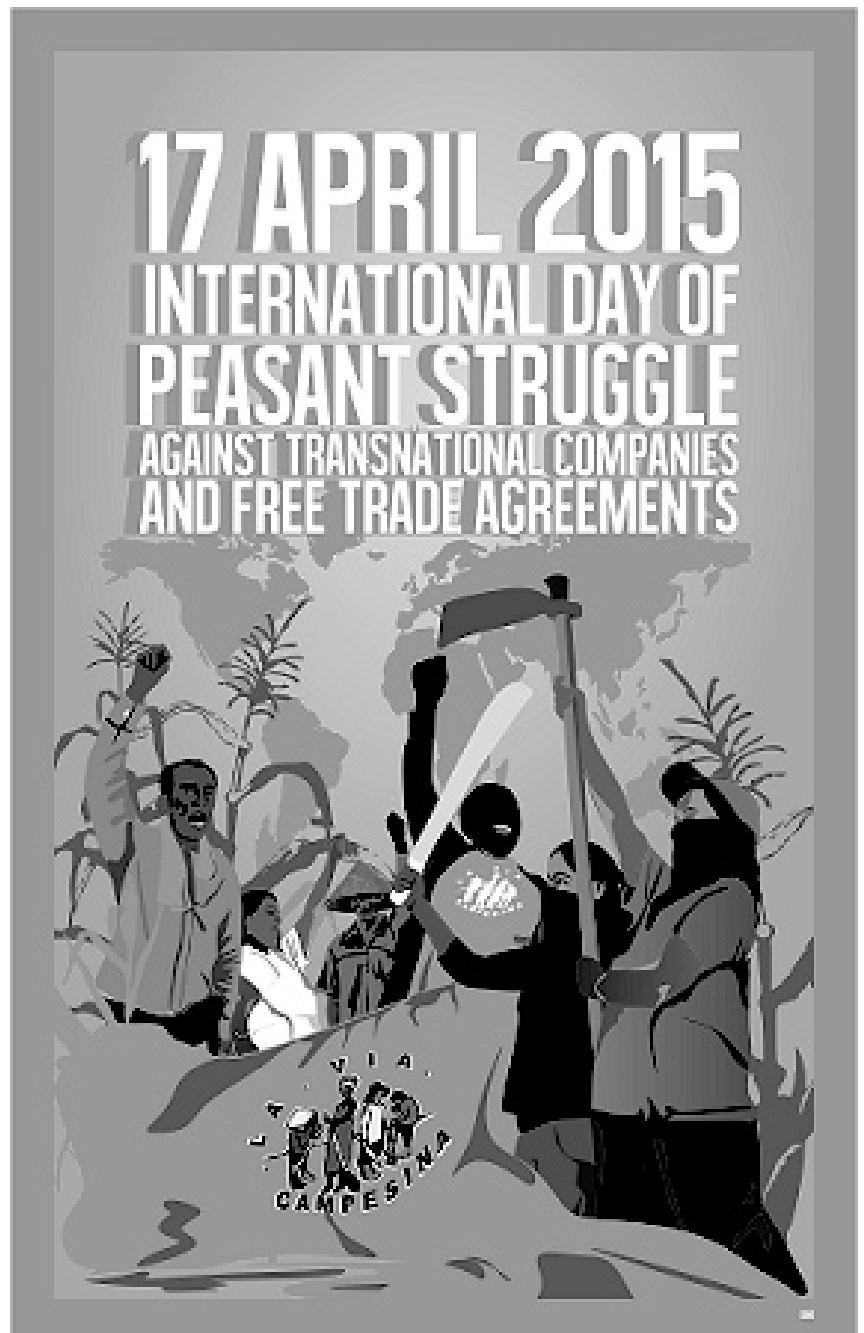
"Saat ini, FTA yang paling signifikan dalam sejarah sedang yang dinegosiasikan oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada. Perjanjian ini, jika selesai, akan meliberalisasi pasar perdagangan dan investasi dalam mendukung perusahaan-perusahaan transnasional," ungkap Ndiakhate lagi.

Marina Dos Santos, anggota ICC La Via Campesina lainnya asal Brasil mengemukakan, dengan ratusan aksi di tingkat lokal dan global di semua benua, La Via Campesina menegaskan kembali pentingnya perjuangan lokal dan pada saat yang sama menggarisbawahi kebutuhan dari perlawanan global dan koordinasi organisasi antara kota dan pedesaan.

"Aksi-aksi tersebut berupa aksi pendudukan lahan, tukar menukar benih, demonstrasi jalanan, pameran kedaulatan pangan, acara budaya, lobi wisata dan debat akan dilakukan hingga akhir bulan sebagai bagian dari aksi global," kata Maria.

Sementara itu, tahun ini ada banyak FTA yang akan difinalisasikan di Eropa. Mulai dari Perdagangan dan Investasi Kemitraan Trans Atlantik (TTIP), Perdagangan Komprehensif dan Perjanjian Ekonomi (CETA), Perdagangan Perjanjian Jasa (TiSA) di Jerman, Swiss dan Belgia.

"Di Asia, ada aksi massa untuk menolak negosiasi Kemitraan



Demi Kedaulatan Pangan, Petani Amerika Latin Berkumpul di Argentina

ARGENTINA. Ratusan petani menghadiri Kongres ke-6 Koordinasi Organisasi Pedesaan Amerika Latin (CLOC) La Via Campesina di Buenos Aires, Argentina mulai 10 - 17 April 2015. Kongres ini dibuka dengan majelis ke-4 pemuda tani Amerika Latin-La Via Campesina.

Diego Monton, perwakilan sekretaris umum CLOC La Via Campesina menjelaskan, kongres yang mengambil tema "Melawan Kapitalisme Untuk Kedaulatan Pangan Masyarakat Kita: Amerika Bersatu dan Terus Berjuang" ini dihadiri perwakilan gerakan petani dari Amerika, Asia, dan Eropa.

"Kongres CLOC-La Via Campesina ini dilaksanakan setiap empat tahun untuk menyatukan semangat perjuangan melawan pelanggaran hak asasi manusia sistematis terhadap kita kaum tani kecil," ungkap Diego.

Sementara itu, para petani kecil yang berpartisipasi dalam kongres akan menganalisis perjuangan, resistensi dan proposal pemuda pedesaan dan perempuan dari seluruh benua.

Dalam kongres ini juga dilaksanakan Majelis Petani Perempuan ke-5 yang berlangsung pada 12 dan 13 April, dan menyoroti strategi untuk mengakhiri kapitalisme patriarki. Ruang ini akan menggarisbawahi kebutuhan untuk membangun sistem baru berdasarkan prinsip-prinsip petani dan feminisme populer serta kedaulatan pangan - konsep sentral antara gerakan tani dan masyarakat adat di seluruh dunia yang mencakup hak untuk swasembada dan hak masyarakat untuk menentukan nasib sendiri atas produksi pangan dan konsumsi.

Diego juga mengemukakan, bahwa bahwa kongres ini sangat penting untuk proses penguatan posisi kaum tani sebagai aktor penting dalam ruang pengambilan keputusan, sehingga memastikan bahwa kedaulatan pangan adalah hak dasar bagi setiap orang.

Henry Magallanes, pemimpin pemuda tani dari wilayah Andes, menambahkan kapitalisme telah maju pesat di negara kita. Oleh karena itu tambahnya, sebagai bagian dari Cloc-La Via Campesina, para pemuda-pemudi tani harus harus meletakkan dasar-dasar fondasi perjuangan di komunitas masing-masing.

"Kongres ini harus menghasilkan kebijakan dan strategi yang mencapai organisasi akar rumput kita dan membantu kita untuk mengembangkan kampanye melawan neoliberalisme mulai dari tingkat komunitas terkecil hingga level internasional," tambahnya.#



(Foto). Kongres ke-V CLOC-La Via Campesina di Buenos Aires, Argentina, April 2015.

Sambungan dari hal. 7

Trans-Pasifik (TTP) oleh pemerintah Jepang sedang diselenggarakan di Jepang dan Korea Selatan; di Amerika Selatan, pawai besar (lebih dari 1.500 orang dari seluruh benua) sedang diselenggarakan di Argentina selama Cloc-Via Campesina (Koordinasi La Via Campesina di Amerika Latin) di Buenos Aires, Argentina," papar Maria.

Hal senada diungkapkan Yudhvir Singh, anggota ICC La Via Campesina dari India. Ia menegaskan, La Via Campesina mengancam hukum dan kepentingan yang berdampak buruk terhadap cara hidup petani, warisan penting dari masyarakat sebagai bagian dari kemanusiaan.

"Gerakan petani sedunia ini mempromosikan kedaulatan pangan untuk mengakhiri kelaparan di dunia dan mempromosikan keadilan sosial," tegas Yudhvir Singh.

Yudhvir menambahkan, alih-alih masa depan yang suram berdasarkan perdagangan bebas dan bisnis besar, La Via Campesina percaya waktunya telah tiba untuk ekonomi berdasarkan ekuitas yang akan mengembalikan keseimbangan antara manusia dan alam.

"Reforma agraria dan pertanian agroekologis adalah jantung dari cara hidup berdasarkan kedaulatan pangan masyarakat," tambahnya.#

Pemerintah Harus Tanggap, Keberadaan Perusahaan Besar Pertanian Tak Untungkan Petani

Peringatan 17 April: Petani Berjuang Melawan Perusahaan Transnasional dan Modal Besar



(Foto). Aksi petani SPI di depan istana negara di Jakarta, menuntut pembaruan agraria dilaksanakan.

JAKARTA. La Via Campesina, gerakan petani dunia, merayakan 17 April sebagai Hari Perjuangan Petani Internasional. Petani merayakan Hari Perjuangan Petani ini sejak tahun 1996, dalam rangka menyoroti kerja keras mewujudkan hak atas tanah, serta untuk mengancam kriminalisasi petani di seluruh dunia.

Petani adalah kelompok rentan: terpinggirkan dan menderita kekerasan setiap hari sebagai akibat dari praktik agribisnis dan implementasi kebijakan neoliberal di pedesaan. Untuk itulah, bagi kaum tani, pengesahan Deklarasi PBB untuk Hak Asasi Petani dan rakyat yang bekerja di pedesaan sangat mendesak. Deklarasi ini akan menjadi salah satu alat untuk mendukung perjuangan kaum tani untuk terus hidup dan meningkatkan martabatnya.

17 April 2015 ini, Serikat Petani Indonesia (SPI) akan berfokus untuk merayakan perjuangan bersama melawan perusahaan transnasional dan modal besar penindas petani kecil. Perusahaan-perusahaan raksasa pangan seperti Monsanto, Cargill, dan modal besar layaknya program food estate layak dienyahkan. Mereka mengganggu kedaulatan petani, melanggar hak mendasar petani seperti mengembangkan benih tradisional, serta membuat pasar sulit diakses petani kecil.

Pada bulan lalu, keadaan Nilai Tukar Petani (NTP) tetap suram. NTP kembali turun ke 101,34. Ini artinya petani tidak mendapatkan untung, walaupun banyak komoditas sedang panen. Buah-buahan, perkebunan dan hortikultura termasuk yang terus menderita kerugian.

Henry Saragih, Ketua Umum SPI di Jakarta menyatakan secara khusus, "Pemerintah harus segera bertindak cepat, karena kehadiran korporasi-korporasi yang bergerak di perkebunan tidak memberikan dampak kesejahteraan yang nyata bagi petani perkebunan rakyat."

Di sektor hortikultura, petani mendapatkan kemenangan kecil karena modal asing tetap dibatasi 30 persen dalam undang-undang. Untuk itu, SPI mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan tata cara divestasi untuk hortikultura.

"Berikan saja akses sumber daya untuk petani. Insya Allah petani Indonesia itu amanah, akan mengolah tanah, air, benih bagi pangan yang terhidang untuk keluarga," pungkash Henry lagi di Jakarta (17/04).

Henry melanjutkan, SPI menolak upaya korporatisasi dalam mencapai kedaulatan pangan. Mustahil kedaulatan pangan bisa ditegakkan kalau mengandalkan korporasi pangan.

"Karena itu kita menolak rencana food estate sebagai upaya untuk implementasikan kedaulatan pangan di Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi-JK karena korporasi pangan akhirnya akan mengancam kedaulatan pangan, karena korporasi akan mendikte pemerintah dalam kebijakan-kebijakan pangan. karena itu rencana pemerintah untuk distribusikan tanah 9 juta ha adalah untuk didistribusikan kepada petani untuk dikelola sebagai pertanian keluarga yang terorganisir dalam koperasi-koperasi petani, bukan korporasi pertanian," paparnya.

Dalam peringatan ini, SPI kembali menyerukan penguatan perjuangan sosial dan organisasi tani di Indonesia. SPI akan terus bekerja keras untuk membuat tuntutan kaum tani jadi nyata: reforma agraria sejati dan serta menegakkan kedaulatan pangan rakyat Indonesia.

Nawa Cita sebagai program pemerintah 2014-2019 sudah eksplisit menyebutkan capaian-capaian untuk hak atas tanah, kedaulatan pangan, dan agar sumber daya agraria bisa dikuasai petani.

Momentum Hari Perjuangan Petani Internasional ini tepat untuk mengingatkan pemerintah, bahwa sumber-sumber tersebut jangan terus dicaplok perusahaan transnasional dan modal besar. Saatnya petani Indonesia berdaulat di atas tanahnya sendiri.#

**Inisiatif Fungsional & Konkret Kedaulatan Pangan
Jangan Lupa Didorong Jokowi**

Asia-Afrika untuk Kedaulatan Pangan

**oleh Henry Saragih*



Konferensi Asia-Afrika (KAA) selain progresif, juga mewakili populasi rakyat yang maju sekaligus kompleks. Jika kita melihat sejarah, perjuangan petani, buruh, dan hak asasi di kawasan ini sangat masif.

Ada potensi kerja sama kedaulatan pangan yang bisa ditindaklanjuti di KAA. Fondasi semangat Asia-Afrika telah didirikan pada KAA dan dibangun dalam beragam inisiatif global dan regional yang mengangkat martabat manusia dan penemuan kesetaraan dalam kerja sama antarbangsa.

Penguyuban demi adu kekuatan dijawab dengan solidaritas serta upaya riil dalam penguatan kedaulatan dari bangsa-bangsa yang baru merdeka. Begitu pun ketika Perang Dingin berakhir. Semangat Asia-Afrika mendapatkan momentum dalam mengartikan kerja sama antarbangsa sebagai penguatan negara dalam mengembangkan masyarakat dunia yang lebih adil dan damai.

Contoh konkret solidaritas ini terwujud di mekanisme hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Inisiatif deklarasi hak asasi petani telah maju karena dukungan negara-negara Asia-Afrika. Dua kali resolusi, negara-negara Asia-Afrika bersama dengan Amerika Latin solid mendorong pengakuan dan perlindungan hak-hak petani.

Namun, tak melulu success story, kawasan Asia-Afrika juga masih menyimpan banyak masalah. Salah satunya adalah ketimpangan.

Dari 1990 ke 2010, rata-rata tingkat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) negara-negara berkembang Asia telah mencapai 7 persen atau lebih dari dua kali lipat dari 3,4 persen pertumbuhan di Amerika Latin dan Karibia. Pertumbuhan ini utamanya didorong Tiongkok dan India. Dua negara dengan populasi terbesar di dunia—dengan pertumbuhan PDB per tahun masing-masing 9,9 persen dan 6,4 persen. Pertumbuhan diperkirakan telah mengangkat 700 juta orang dari kemiskinan. Tujuh belas negara berhasil mengurangi lebih dari 15 persen tingkat kemiskinan.

Namun, pertumbuhan ekonomi juga diikuti peningkatan ketimpangan di banyak negara. Koefisien gini pengeluaran per kapita memburuk di 12 negara, termasuk Tiongkok, India, dan Indonesia. Mulai awal 1990-an hingga akhir 2000-an, koefisien gini meningkat dari 32 ke 43 di Tiongkok, dari 33 ke 37 di India, dan dari 29 ke 39 di Indonesia.

Meskipun tingkat ketimpangan di Asia secara umum berada di bawah rata-rata kawasan lain, pertumbuhan koefisien gini Asia berkisar 28-51, dibandingkan dengan 30-66 di Afrika dan 45-60 di Amerika Latin dan Karibia.

Ketimpangan ini terutama diderita petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan. Dari 1 miliar orang yang menderita kemiskinan ekstrem di dunia, 75 persen tinggal dan bekerja di daerah pedesaan. Situasi ini diperparah krisis pangan global pada 2008 dan 2009. Hari ini, 50 persen penduduk dunia yang kelaparan adalah petani kecil yang bergantung keseluruhan atau sebagian pada pertanian untuk mata pencaharian mereka.

Dalam kerangka inilah kedaulatan pangan dan hak asasi petani menjadi penting. Di atas telah disebutkan, negara-negara Asia-Afrika telah mendukung deklarasi hak asasi petani di PBB.

Untuk kedaulatan pangan, paradigma ini adalah yang paling progresif dan bahkan dihasilkan gerakan petani dunia La Via Campesina (1996). Di Indonesia, kedaulatan pangan telah termaktub dalam UU Pangan serta secara eksplisit menjadi misi Nawacita pemerintahan Jokowi. Sementara itu, kedaulatan pangan juga banyak diejawantahkan pemerintahan progresif di beberapa negara Asia dan Afrika. Rakyatnya? Jangan ditanya.

Petani SPI Kalimantan Selatan Datangi Kementerian Agraria & Tata Ruang



(Foto). Petani SPI Kalimantan Selatan foto bersama dengan Ketua Umum SPI Henry Saragih di depan kantor DPP SPI di Jakarta Selatan.

JAKARTA. Guna menyelesaikan konflik lahan, belasan petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) asal Kabupaten Banjar Baru, Kalimantan Selatan (Kalsel) mengunjungi sekretariat Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) di Jakarta (16/04).

Dalam diskusi dengan Ketua Umum SPI Henry Saragih, para petani asal Desa Banjar Baru ini membawa tiga kasus konflik lahan. Pertama adalah konflik petani dengan pengembang kurang lebih 90 hektar di Desa Sukamaju Kabupaten Banjar Baru Kalsel; kedua konflik dengan Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 13 desa kira-kira 3.000 hektar; dan yang ketiga adalah masyarakat adat meminta sertifikat komunal karena khawatir tanah ulayat akan dijadikan pertambangan atau perkebunan.

"Kami sering mendapat ancaman, bahkan Ketua RT pernah diancam dengan golok dan dipukuli oleh preman. Sedangkan mengenai konflik dengan HTI, kami melihat sangat rumit karena hasil dari penelusuran beberapa subkontraktor milik kerabat dekat dari pejabat daerah," kata salah seorang petani.

Menanggapi hal ini, Henry Saragih menjelaskan, pengakuan tanah ada dua jenis, pertama dari pemerintah, kedua dari masyarakat adat.

"Mengenai sertifikat komunal, saat kita audiensi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang mengusulkan untuk lahan kolektif diberikan sertifikat kolektif bukan individu. Pilihannya tergantung pada kondisi, jika memungkinkan sertifikat komunal dikeluarkan maka perjuangkan, jika tidak maka tanah tersebut tanah negara yang dikelola oleh petani untuk lahan pertanian," jelas Henry.

Setelah berdiskusi, para petani Kalsel bersama DPP SPI bergegas menuju Kementerian Agraria dan Tata Ruang guna menyerahkan draft pengaduan dan laporan konflik.#

Petani Bersatu Tak Bisa Dikalahkan

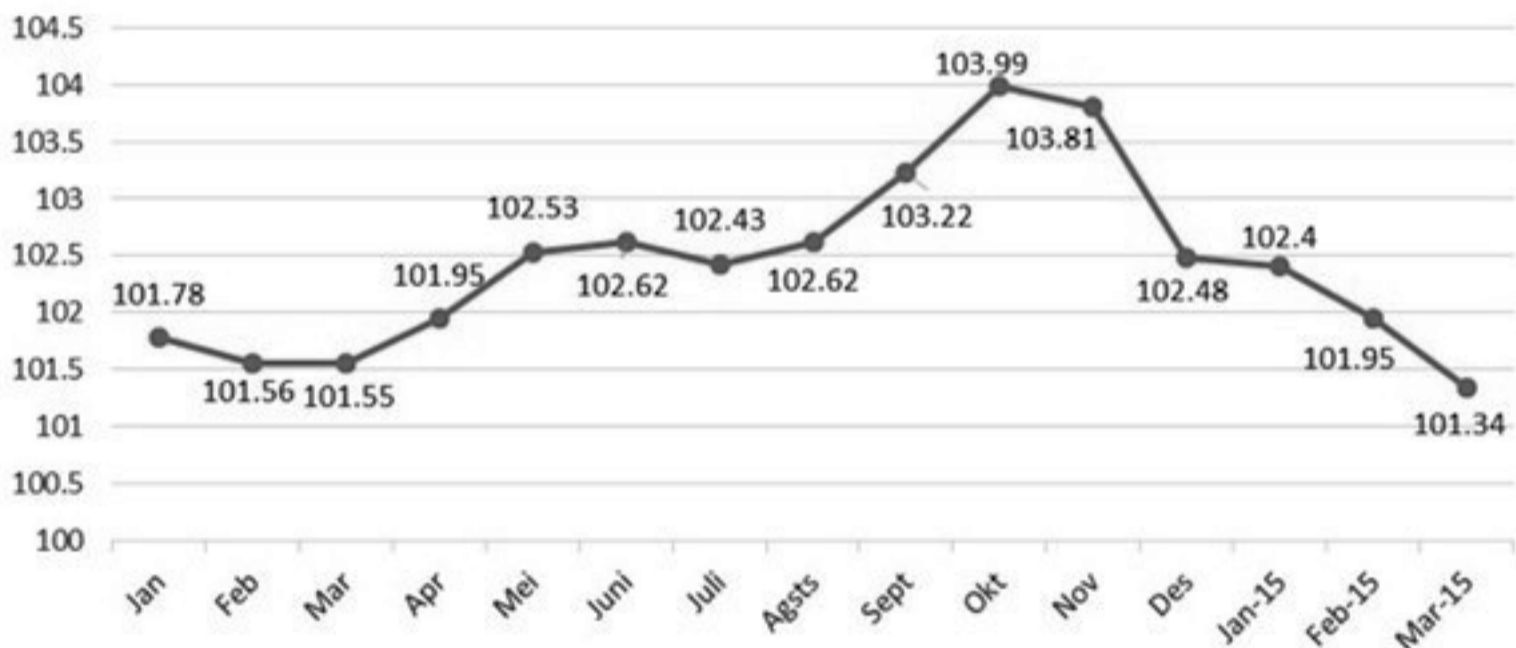
www.spi.or.id



NTP Hortikultura, Perkebunan Rakyat, & Pangan di Maret 2015 : Suram

JAKARTA. Bulan Maret 2015 adalah bulan yang suram bagi petani, karena pada bulan ini Nilai Tukar petani (NTP) tanaman hortikultura, perkebunan rakyat, dan pangan kembali turun. Menurut laporan Badan Pusat Statistika (BPS) awal bulan ini (01/04), nilai NTP hortikultura kembali turun dari 101,95 ke 101,34. Penurunan ini kembali disebabkan oleh turunnya harga penjualan buah-buahan (salak dan rambutan), kenaikan harga kebutuhan rumah tangga (inflasi pedesaan) dan biaya produksi. Meski demikian, NTP bulan ini terdongkrak, sehingga tidak turun drastis, oleh naiknya harga penjualan bawang merah di tingkat petani.

Perkembangan NTP Hortikultura Jan-14 s/d Mar15



Muhlasin, petani Serikat Petani Indonesia (SPI) asal Kabupaten Pringsewu, Lampung menuturkan turunnya harga buah-buahan karena adanya panen raya.

"Harga duku di petani per kilogramnya cuma Rp 1.500, harga rambutan Rp 500 per kilogram, dan harga durian cuma Rp 5.000 per kilogram. Daripada panennya tidak laku, akhirnya kami petani menjualnya dengan harga yang sangat murah. Seharusnya pemerintah daerah membangun industri pedesaan pengolahan hasil pertanian yang menampung hasil panen kami dengan harga yang layak," tutur Muhlasin yang juga Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Lampung pagi ini (02/04).

Senada dengan NTP hortikultura, NTP perkebunan rakyat Maret 2015 kembali turun dari 97,6 ke 97,46 (lihat grafik) pada bulan Maret. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya harga penjualan komoditas kakao dan kelapa sawit, dua komoditas unggulan ekspor Indonesia, meski kurs Dollar Amerika mengalami kenaikan hingga berkisar pada level Rp 13.000.

Zubaidah, petani sawit SPI asal Kabupaten Asahan Sumatera Utara menyampaikan, seluruh petani sawit di daerahnya mengeluhkan rendahnya harga tandan buah segar (TBS).

"Harga TBS sangat rendah, cuma Rp 1.050 per kilogramnya, padahal buahnya pun tidak ada. Biasanya kalau stok buah sawit tidak ada atau sedikit, harga akan naik, ini malah makin turun," kata Zubaidah di Asahan (02/04).

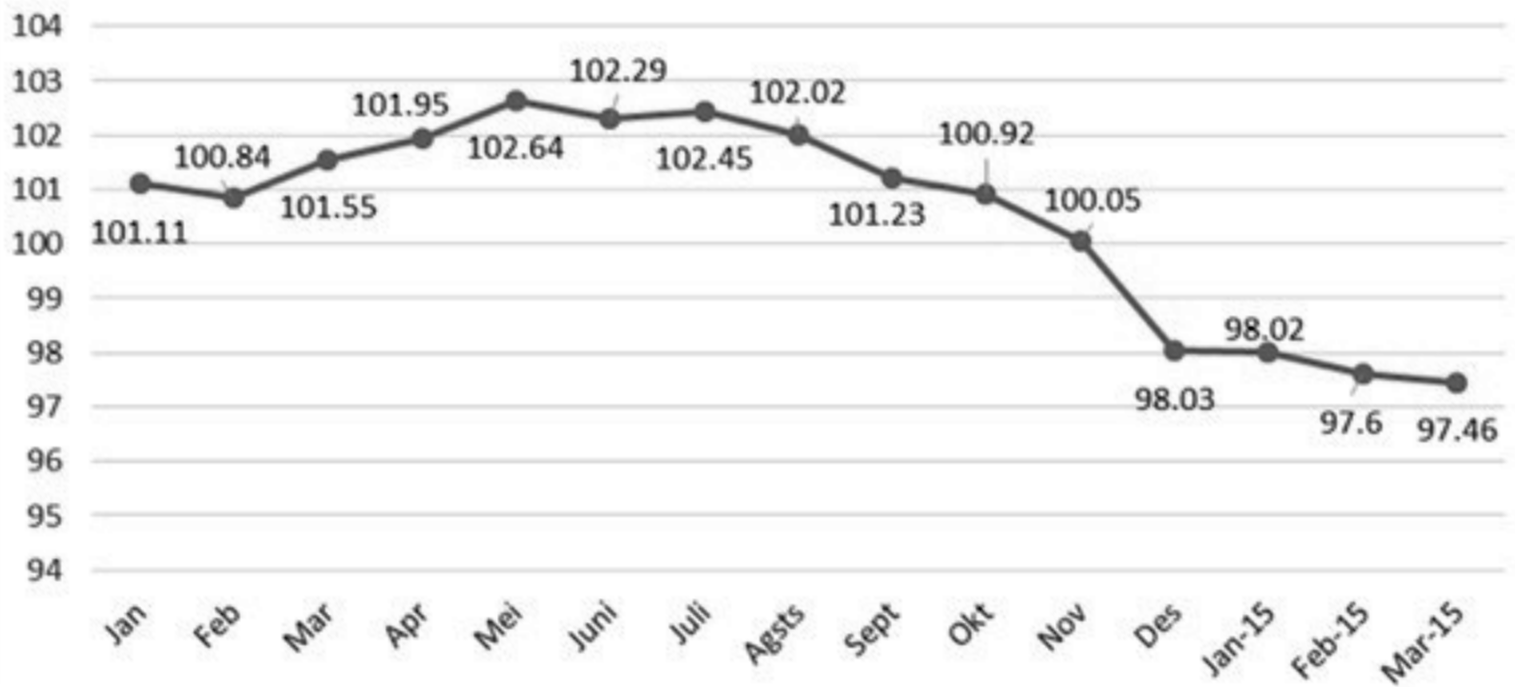
Menurut Ketua Umum SPI Henry Saragih, hal ini harus perhatian serius bagi pemerintah karena kehadiran korporasi-korporasi yang bergerak di perkebunan, tidak memberikan dampak kesejahteraan yang nyata bagi petani perkebunan rakyat.

"Efek menetes (trickle down effect) dari kue hasil perkebunan belum sepenuhnya terbagi kepada petani perkebunan rakyat. Dalam hal ini kue tersebut semakin besar seiring dengan perkembangan harga minyak goreng kemasan yang terus naik dan semangat pengusaha kelapa sawit untuk menghambat moratorium perkebunan kelapa sawit," ungkap Henry Saragih di Jakarta pagi ini (02/04).

Sementara itu, setelah mengalami kenaikan di Februari 2015, NTP Tanaman Pangan Maret 2015 mengalami penurunan dari 102,30 ke 100,80.

Harga beras yang terus naik hingga pada Maret 2015 tidak berimbas pada kenaikan nilai tukar petani atau harga penjualan beras/gabah di tingkat petani. Bahkan setelah Bulog melakukan operasi pasar, harga beras tetap tidak turun. Demikian pula setelah Presiden mengeluarkan Inpres Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk menaikkan harga Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp 3.700/Kg. Kenaikan harga beras di

Perkembangan Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat
Periode Jan14- Mar15



pasaran juga berimbas pada kenaikan harga-harga kebutuhan rumah tangga lainnya dan demikian pula pada kenaikan harga kebutuhan usaha tani, seperti kebutuhan pupuk subsidi yang biasa langka menjelang musim tanam. Belum juga adanya kenaikan kembali BBM di akhir bulan Maret. Kenaikan semua kebutuhan tersebut menimbulkan inflasi pedesaan sebesar 0,48%.

“Saat ini di Pringsewu Lampung, harga GKP itu berkisar di Rp 4.300 per kilogram. Akibatnya kami petani banyak yang menjualnya ke pedagang daripada pemerintah, itu jugalah mengapa kualitas beras yang dibeli pemerintah (Bulog) sering jelek, karena petani cenderung menjual berasnya yang memiliki kualitas bagus ke pedagang,” tutur Muhlasin.

Henry Saragih menambahkan distribusi menjadi titik kritis utama dalam penentuan harga beras di pasar, sehingga naiknya harga beras tidak semata-mata terjadi karena kelebihan jumlah beras di tingkat petani ataupun di tingkat pasar. Bahkan pasar pun tidak berdaya (kegagalan pasar) karena permainan mafia beras dalam rantai pasok atau rantai nilai perberasan.

“Pemerintahan Jokowi-JK harus tegas terhadap mafia beras ini, agar kedaulatan pangan bisa tercapai,” tambahnya.#

Perkembangan NTP Pangan - Jan14-Mar15



Divestasi, Langkah Lanjut Lindungi Hortikultura



(Foto). Petani SPI sedang memanen sayuran.

JAKARTA. Hasil *judicial review* UU Hortikultura sudah tak bisa diganggu gugat. Kepemilikan asing tetap dibatasi. Usaha hortikultura, benih lokal dan hasil keringat petani harus dilindungi.

Petani, pemulia benih dan pemerintah bersorak. Tapi apa tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut?

Serikat Petani Indonesia (SPI) melaksanakan diskusi kelompok terarah khusus untuk membahas tindak lanjut UU Hortikultura ini di Jakarta, Rabu (8/4). Di antara peserta yang hadir adalah Kementerian Pertanian RI, elemen gerakan rakyat, LSM, wartawan dan mahasiswa.

Modal asing untuk usaha hortikultura dibatasi 30 persen. "Satu bulan ke depan, pemerintah melalui Kementerian Pertanian menargetkan tata cara divestasi perbenihan," kata Sri Wijayanti Yusuf dari Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI.

Henry Saragih, Ketua Umum SPI juga menyerukan tindak lanjut segera untuk hortikultura. "Kita harus lindungi petani. Seharusnya tidak hanya 30 persen—asing harus dibatasi hingga 0 persen dan kita harus mandiri di bidang hortikultura."

"Kemenangan ini juga harus disiarkan dari petani ke petani," ujar dia lagi.

"Negara sudah mengakui kemampuan petani untuk mandiri. Saatnya kita bekerja keras membenahi tanaman buah, sayur, obat dan hias kita."

Ia menambahkan lagi, "ada 2.000-an lebih varietas unggul yang kita hasilkan sejak dekade 80-an. Tinggal sinergi dengan pemerintah untuk memajukan terutama sayur dan buah kita: misalnya kampanye nasional makan sayur dan buah."

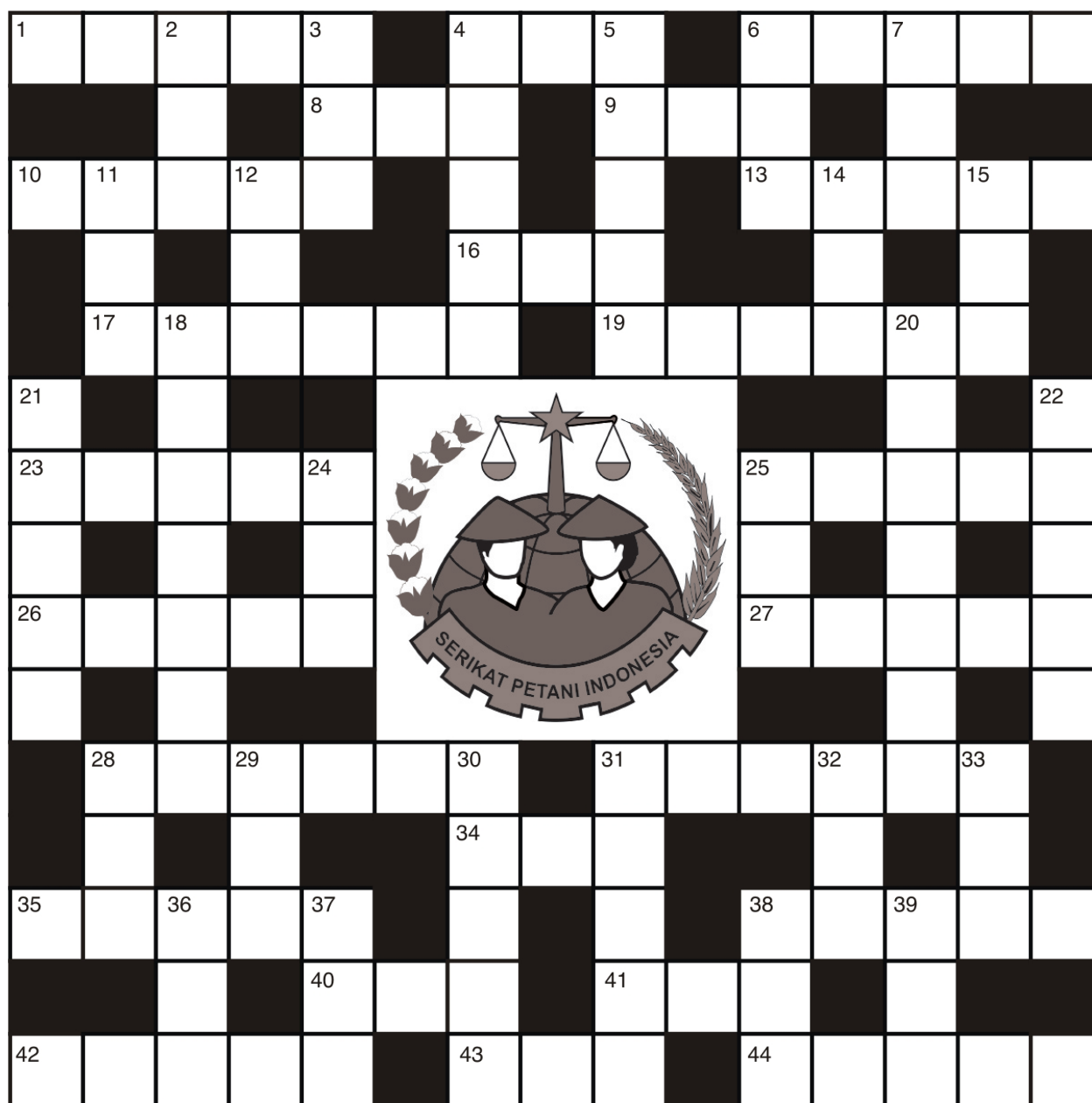
Divestasi pun tak cukup untuk mengembalikan kedaulatan sektor hortikultura ke tangan petani Indonesia.

"Perlu pengarusutamaan dari pemerintah," ujar Ridwan Darmawan, Direktur Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS). "Tindak lanjut UU biasanya cepat untuk korporasi, tapi tidak untuk rakyat," kata dia lagi.

Divestasi, penyebaran informasi, pendidikan petani untuk benih, produksi dan pemasaran produk hortikultura harus segera dilaksanakan. Merespon inisiatif baik Kementerian Pertanian RI, seluruh peserta akan diikutsertakan pada proses pembuatan kebijakan terkait divestasi usaha hortikultura tersebut.

"Ya, (organisasi tani) akan diikutsertakan dalam finalisasi draft divestasi tersebut," pungkas Sri Wijayanti.#

TEKA TEKI SILANG PEMBARUAN TANI - 053



MENDATAR

1. Salah satu bahan pangan kita 4. Nutrisi terbaik bagi bayi 6. Lautan di antara dua pulau
8. Pekan Olahraga Nasional 9. Pasangan baut 10. Olahraga sejenis bisbol 13. Manusia 16. Ilmu Pengetahuan Alam 17. Gemulai 19. Serbu 23. Pendapat 25. Satelit Bumi 26. Wewangian 27. Sejenis sayuran 28. Alat transportasi roda dua 31. Tempat duduk di atas kuda 34. Palang Merah Indonesia 35. Penyanyi perempuan Indonesia 38. Air laut yang bergulung 40. Pecahan mata uang 41. Alat perekat 42. Variasi pilihan 43. Lubang di kaki gunung 44. Bagian tubuh yang tidak boleh dilihat orang lain (Islam)

MENURUN

2. Suku bangsa 3. Ormas tani kebanggaan kita 4. Kuno, jaman dulu 5. Pulang modal, lunas 6. Metode penanaman padi 7. Metode menyambung besi 11. Semua (Inggris) 12. Satuan berat 14. Liga bola basket Amerika Serikat 15. Remaja (singkatan populer) 18. Babak, bagian 20. Seseorang yang mata pencahariannya mencari ikan dan satwa lain di laut 21. Bujur sangkar, persegi 22. Hasrat, perhatian 24. Merasa kasihan 25. Bagian isi buku 28. Sekolah Menengah Atas 29. Cocok, klop, tak lebih tak kurang 30. Mengambang di atas air 31. Trofi 32. Tujuan (Inggris) 33. Kata tanya 36. Buah pikiran 37. Harapan 38. Nenek (Belanda) 39. Alat pertukangan.

Sambungan dari hal. 10

Kedaulatan pangan muncul dari gerakan rakyat— ratusan organisasi rakyat yang membentuk La Via Campesina mayoritas berasal dari dua benua yang kental sejarah penjajahannya ini.

Untuk itu, inisiatif fungsional dan konkret kedaulatan pangan jangan lupa didorong Jokowi. Momentum ini tak datang sering-sering. Indonesia sudah memulai upaya redistribusi sumber daya agraria: tanah, air, dan benih. Indonesia akan terus berusaha memenuhi kebutuhan lokal pangannya sendiri secara berkelanjutan. Indonesia sudah punya kebijakan publik untuk melindungi hak asasi petaninya.

Skala ini harus diperbesar di tingkat Asia dan Afrika. Ingat, dua benua ini bisa dikatakan punya tanda merah dalam pemenuhan hak atas pangan rakyatnya. Kedaulatan pangan jelas relevan. Misi Nawacita Jokowi juga relevan, apalagi pemenuhan pangan tak hanya dari darat—juga dari laut di kawasan Asia-Afrika.

Menurut van der Plog, seorang profesor Universitas Wageningen, belum pernah dalam sejarah jumlah petani sebesar saat ini. La Via Campesina menyelor angka petani kecil sebanyak 2,2 miliar jiwa di seluruh dunia. Mayoritas ada di Asia dan Afrika. Agenda kedaulatan pangan harus menjadi poin penting solidaritas dan tindak lanjut dalam forum mulia Asia Afrika nanti.

**Penulis adalah Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, artikel ini juga telah diterbitkan di Harian Sinar Harapan edisi 22 April 2015*



Petani Bersatu Tak Bisa Dikalahkan

www.spi.or.id

Permentan 82 Harus Direvisi



(Foto). Diskusi publik untuk memperingati Hari Perjuangan Petani Internasional dan Hari Hak Asasi Nasional di DPP SPI, Jakarta (21/04).

JAKARTA. Peraturan Menteri Pertanian (Permenta) 82 sangat kental dengan diskriminasi, karena kelompok tani bukan menjadi sifat, akan tetapi menjadi entitas. Hal ini diutarakan Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Petani Indonesia (SPI) Agus Ruli Ardiansyah saat diskusi publik untuk memperingati Hari Perjuangan Petani Internasional (17 April) dan Hari Hak Asasi Nasional (20 April) di kantor sekretariat DPP SPI, di Jakarta Selatan, Selasa (21/04).

"Akhirnya organisasi tani tidak terakomodir dan tidak bisa mengakses program atau bantuan dari pemerintah. Hal itu ditegaskan juga dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Perlintan), sebelum Pasal 59, Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 diubah berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pedoman dan pembinaan tidak hanya kepada kelompok tani, tetapi juga kepada organisasi tani. Permentan 82 harus direvisi," tegas Agus Ruli.

Agus Ruli menyampaikan, Permentan yang baru harus mengakomodir petani kecil dan petani tak bertanah. Terlebih di Rencana Definitif Kelompok (RDK) mencantumkan luas lahan, sedangkan petani kecil/buruh tani tidak memiliki lahan. Pada sisi yang lain, penyuluh pertanian jumlahnya terbatas. Maka sebaiknya penyuluh swasta dan penyuluh swadaya bisa dimanfaatkan dan memiliki wewenang yang sama dengan penyuluh PNS.

Menanggapi hal tersebut, Ranny Mutiara Chaidirsyah selaku Sekretaris Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Kementerian Pertanian menyampaikan, Permentan 82 secara tersirat menegaskan bahwa petani di luar kelompok tani tidak bisa mengakses program maupun bantuan. Maka dari pada itu, diharuskan untuk merevisi Permentan tersebut sesuai dengan putusan MK.

Ranny melanjutkan, perihal subsidi pupuk yang tidak tepat sasaran terdapat contoh kasus di Karawang, dalam satu desa pemilik lahan hanya berjumlah 2 orang masing-masing 23 ha per orang dengan anggota kelompok tani sebanyak 40. Kelompok tani itulah yang mendapat subsidi pupuk walaupun keteradilan sangat jauh dari kenyataan. Petani mayoritas menjadi buruh dan bersumber hanya pada 2 orang. Padahal pupuk bersubsidi hanya bagi petani yang menggarap lahan 2 ha ke bawah.

"Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mendefinisikan kelembagaan petani. Sekarang marilah bersama-sama kita perbaiki Permentan 82 untuk melakukan pembenahan. Karena macam-macam permasalahan yang terjadi harus segera diselesaikan melalui regulasi," tutur Ranny.

Sementara itu, Gunawan dari Indonesia Human Right Commission for Social Justice (IHCS) mengemukakan, Permentan pembinaan lembaga petani yang baru nanti, hanya poktan, gapoktan dan lembaga inisiasi petani.

"Kita pada diskusi ini harus bisa membedakan kewenangan, misalnya mengenai penyuluh karena yang memiliki kewenangan itu daerah bukan Kementerian Pertanian. Letak permentan terdapat dua, yaitu lembaga petani dan lembaga ekonomi petani. Kekuatan perlindungan petani adalah dari pemberdayaan petani," ungkapnya.

Agus Ruli Ardiansyah menambahkan, Permentan yang baru harus mengandung pembinaan dan pemberdayaan terkait persoalan teknis, informasi dan juga pemberdayaan advokasi, hak tanah, dan terlibat dalam kebijakan.

"Organisasi tani lebih ideal dibanding kelembagaan tani," tambahnya.#